



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RUSWANTO S.**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **201448**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **2.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/140 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 324 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 636 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 1750 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 1545 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 4788 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 590 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/240 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **380.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, TATA ARIA PURE 2.2 MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU F 651RVGMDFJ (4X2) Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



4. MOTOR, HONDA NC1183CA/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.		
8.000.000		
5. MOTOR, HONDA D1802N26L2A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI		
Rp. 14.000.000		
6. MOTOR, BAJAJ PULSAR 135 LS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.		
8.000.000		
7. MOBIL, TOYOYA KIJANG Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp.		
48.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	79.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.304.100
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.863.104.100
III. HUTANG	Rp.	113.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.750.104.100

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.